

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMI COVID 19

Gito Prasetyo¹, Adji Suradji Muhammad², Rudi Subiyakto³
gitoprasetyo37@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim
Raja Ali Haji

Abstract

The direct election of regional heads by the people is a means of realizing people's sovereignty in order to produce a democratic regional government. The purpose of this study was to determine the strategy used by the General Election Commission of Tanjungpinang City in increasing political participation during the covid 19 pandemic. This study used a qualitative descriptive research method, the data source was primary data with interviews and observations and secondary data from documentation such as written reports or reports publication. This study uses Chandler's theory in the stages of strategy formulation, namely the formulation and long-term targets, which are the efforts made by the Tanjungpinang City KPU in planning by considering various aspects. The selection of actions is the implementation of the strategy that has been formulated by the KPU Tanjungpinang City such as forming democracy volunteers, Resource Allocation related to the ability of individuals or organizations to carry out an activity, in an effort to increase the resources of the Tanjungpinang City KPU carrying out activities in the form of technical guidance to democracy volunteers and all concurrent election organizing committee. This study uses three techniques, namely interviews using interview guidelines supported by recording devices and writing instruments, Observation, which is used to make direct observations in the field, as well as documentation obtained from written relics, archives of laws and regulations and others have a relationship with the problem under study. The conclusion of this study shows that the KPU Tanjungpinang City has applied the principles of the stages of strategy formulation according to Chandler, namely formulation and long-term goals, selection of actions, and allocation of resources.

Keywords: Strategy, Political Participation, Covid 19

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi yang dalam penerapannya menginginkan kebebasan partisipasi politik yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Salah satu perannya yaitu dengan menentukan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia melalui sebuah pemilihan umum. Untuk mewujudkan itu maka pemerintah dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sebuah upaya membangun demokrasi.

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia maka pasti berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik

masyarakat yang telah memiliki hak suara pada pemilihan tersebut. Menurut Ramlan Surbakti (Subakti, 2007) partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Inti dari demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan yang demokratis sampai saat ini masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang terbaik (Kario, 2017)

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi dapat terwujud dalam berbagai bentuk, Salah satu wujud partisipasi politik adalah kegiatan pemilihan yang mencakup “suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seseorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan” (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam (Muhammad et al., 2018)

Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU)”, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia. (Gleko et al., 2017)

Setelah reformasi, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga negara, salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. (Eva Fauzia, 2019)

Pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pemilihan umum dilaksanakan secara serentak, artinya Indonesia melakukan pemilihan serentak baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah secara bersamaan dalam waktu dan tanggal yang sama. Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara. (Siti Zaenab, 2019)

Pilkada serentak adalah momentum untuk elit politik daerah untuk menguji tingkat dukungan mereka di depan masyarakat lokal, apakah mereka benar-benar tokoh masyarakat yang dipercaya oleh warganya Menurut Bambang Purwoko (2006), digelarnya model pemilihan Kepala Daerah secara langsung membawa dampak yang cukup serius terhadap perilaku politik di tingkat lokal. Para aktor politik lokal tiba-tiba mendapatkan arena bermain yang cukup luas untuk menyalurkan bakat-bakat politik mereka secara bebas. (Subiyakto, 2011)

Dalam praktik kita pun partisipasi politik digunakan sebagai indikator keberhasilan pemilu, dalam konteks ini pula KPU sebagai penyelenggara pemilu menyusun target capaian partisipasi politik di setiap pemilu (Fitriah et al., 2021).

Pilkada serentak tahun ini menjadi pilkada pertama yang diselenggarakan dalam kondisi pandemi covid-19 tentu strategi yang dipilih dalam melakukan sosialisasi akan berbeda dengan sosialisasi pada pada pilkada yang tidak dalam Kondisi pandemi covid-19. Berbicara mengenai strategi menurut chandler strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dalam (Gleko et al., 2017)

Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan di 270 daerah dengan rincian 9 daerah Provinsi dan 261 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan Kepala daerah salah satunya Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau sendiri melaksanakan 7 (tujuh) pemilihan Kepala daerah yaitu

pemilihan Gubernur Kepulauan Riau, pemilihan Walikota Batam, pemilihan Bupati Bintan, Lingga, Anambas, Natuna, dan Karimun, hanya Kota Tanjungpinang yang tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di Tahun ini karena telah melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018. Berikut hasil Pemilihan kepala daerah serentak provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pilkada Kepulauan Riau 2020

No	Nama Kab/Kota	Pemilih	Pengguna hak pilih	Persentase
1	Bintan	112.713	87.095	77,27%
2	Karimun	169.165	113.655	67,18%
3	Kepulauan Anambas	32.418	26.502	81,75%
4	Kota Batam	610.521	377.387	61,81%
5	Kota Tanjungpinang	151.741	92.825	61,17%
6	Lingga	72.336	57.231	79,11%
7	Natuna	54.514	46.195	84,73%
Total		1.203.408	800.890	66,55%

Sumber: SK KPU Kepulauan Riau, (data olahan 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan suara diatas, tingkat partisipasi politik pemilih Kota Tanjungpinang pada pilkada serentak 2020 Kepulauan Riau sebesar 61,17% dengan rincian dari 151.741 pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 92.825 dan ini menjadi persentasi terendah di antara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Bedasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan partisipasi Politik pada masa Pandemi Covid-19, serta untuk melihat apa saja kendala-kendala yang ditemui oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam mensosialisasikan pilkada serentak 2020.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berlandaskan filsafat dan postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah, dimana peneliti adalah sebagai Instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). (Sugiyono, 2012)

Analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sumber data dari data primer dengan proses wawancara dan observasi serta data sekunder dari laporan tertulis atau publikasi. Data penelitian yang didapat dianalisis melalui sejumlah tahapan, yakni mempersiapkan instrument data, dilanjutkan dengan mengumpulkan data, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang strategi komisi pemilihan umum Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan partisipasi pada pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian:

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Perbedaan
1	Eva Fauzia (Eva Fauzia, 2019)	Strategi komisi pemilihan umum daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran	Pada penelitian ini dalam menganalisis hasil penelitian eva fauzia menggunakan teori dari Newman
2	Nilam Satma dan Nora Eka Putri (Sukma & Putri, 2019)	Strategi komunikasi KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu kada tahun 2018	Pada penelitian ini fokus strategi komunikasi KPU Kota Padang
3	Dwi Hariyono (Haryono, 2018)	Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015	Pada fokus yaitu partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota
4	Siti Zainap (Siti Zaenab, 2019)	strategi komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	Pada penelitian ini membahas mengenai Strategi komunikasi dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih dan juga pada teori yang digunakan yaitu John Middleton.
5	Bilhaqi Amjada A'raaf (Araaf, 2019)	Strategi komunikasi komisi pemilihan umum Propinsi Riau dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa di Kota Pekanbaru pada pemilihan Gubernur 2018.	Pada penelitian ini fokus pada penerapan strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU

Sumber: olahan peneliti, 2021

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Chandler tentang tahapan penyusunan strategi dalam (Gleko et al., 2017)

Dalam penelitian ini menggunakan teori Chandler tentang tahapan penyusunan strategi dengan beberapa indikator dan temuan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Komisi pemilihan umum memiliki tugas yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, terkait dengan formulasi dan sasaran jangka panjang Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah merumuskan beberapa strategi dalam mensosialisasikan pilkada serentak 2020. Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan utama yaitu “kemenangan”. Dalam konteks pemilu fokus strategi adalah pemenangan pemilu bagi kandidat, sedangkan bagi penyelenggara adalah bagaimana agar partisipasi pemilih meningkat. (Pulungan et al., 2020)

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan sangat penting dalam pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. (Budiono, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan notulensi yang peneliti lakukan dengan bapak Aswin Nasution S.Pt beliau menjelaskan KPU Kota Tanjungpinang membuat dan membuat program relawan demokrasi berjumlah 25 orang yang dibagi menjadi 5 basis yaitu Basis perempuan, Basis marginal, kebutuhan khusus dan disabilitas, Basis pemuda dan pemilih pemula, Basis komunitas, dan Basis keluarga & keagamaan. Dibaginya relawan demokrasi kedalam 5 basis tadi guna agar lebih dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pilkada di Kota Tanjungpinang dengan kondisi dalam masa pandemi dan waktu yang tersedia juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat guna untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pilkada serentak 2020 di Kota Tanjungpinang.

pada pilkada serentak 2020 berdasarkan wawancara oleh peneliti menemukan bahwa metode sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah dengan menggunakan metode earned media atau public relation yaitu sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan media sosial, menjadi pembicara di beberapa radio dan Televisi yang ada di Kota Tanjungpinang. Penggunaan public relations sebagai alat komunikasi juga terkait dengan optimalisasi “kehadiran” baik di dunia nyata maupun dunia maya. (Lailiyah & Abdulrahman, 2017)

2. Pemilihan Tindakan

Untuk mencapai visi, misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara dan tulensi yang peneliti lakukan, dalam mendukung dan membantu KPU Kota Tanjungpinang dalam mensosialisasikan pilkada serentak 2020 KPU Kota Tanjungpinang membuat relawan demokrasi dan membagi ke Lima segmen agar dapat mendukung dan membantu KPU Kota Tanjungpinang dalam mensosialisasikan pilkada serentak ke masyarakat Kota Tanjungpinang baik itu secara langsung seperti dari mulut ke mulut maupun daring melalui media sosial

Kemudian berdasarkan wawancara dan hasil notulensi peneliti dengan bapak Aswin Nasution selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, sesuai dengan yang telah dirumuskan KPU Kota Tanjungpinang juga melakukan sosialisasi melalui beberapa metode diantaranya:

1. Sosialisasi melalui Media Massa

Penggunaan media seperti koran, radio dan televisi sangat diperlukan untuk menjelaskan serta memberikan informasi kepada masyarakat yang tersebar tanpa harus ketemu secara langsung dimanapun mereka berada. Media massa dapat pula memberikan pemahaman mengenai pesan yang disampaikan kepada khalayak. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak. Sifat media massa adalah cepat, yang dimaksud dengan keserempakan disini ialah keserapakan kontak antara komunikator dengan komunikan yang demikian besar jumlahnya. (Haryono, 2018), Dikarenakan kondisi masih dalam pandemi covid-19 radio dan surat kabar/ menjadi salah satu solusi untuk menjangkau masyarakat tanpa menyebabkan kerumunan karena di Kota Tanjungpinang beberapa radio dan surat kabar/Koran masih eksis setiap harinya untuk memberikan Informasi kepada masyarakat.

2. Solusi melalui Media Sosial

Pada masa sekarang dalam dikatakan hampir semua lapisan masyarakat mempunyai media sosial baik dari generasi x sampai dari generasi z, sehingga media sosial menjadi salah satu metode yang tepat untuk melakukan sosialisasi. Menurut Onong Uchjana Effendy, (2016:37) untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan. Mana yang terbaik dari sekian banyak media komunikasi itu tidak dapat ditegaskan dengan pasti sebab masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan (Sukma & Putri, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan notulensi peneliti menemukan KPU Kota Tanjungpinang dibantu oleh relawan demokrasi yang seluruhnya diisi oleh anak-anak muda menyusun poster video maupu dengan topik-topik menarik yang akan di posting dan di share pada media sosial KPU Kota Tanjungpinang, maupun relawan demokrasi. Tidak hanya sosialisasi dengan postingan video atau foto-foto saja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang juga mengajak masyarakat turut ikut mengsucceskan Pilkada serentak 2020 dengan mengadakan lomba pembuatan video pada platfon media sosial KPU Kota Tanjungpinang.

3. Sosialisasi melalui spanduk/baliho

tidak hanya menjangkau masyarakat melalui daring, Komisi pemilihan umum Kota Tanjungpinang juga melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk, baliho dll di beberapa sudut jalan yang dianggap tepat dan masyarakat dengan mudah untuk melihatnya.

4. Sosialisasi melalui aplikasi belajar daring

Komisi pemilihan Umum juga melakukan sosialisasi kepada siswa yang ada di Kota Tanjungpinang, dengan mengusung tema go to school, KPU Kota Tanjungpinang melakukan sosialisasi ke 10 SMA yang ada di Kota Tanjungpinang dikarenakan proses pembelajaran di Kota Tanjungpinang pada saat sosialisasi masing melalui daring maka KPU Kota Tanjungpinang juga melakukan sosialisasi melalui aplikasi belajar daring dengan target utama adalah pemilih pemula, tujuannya yaitu memberikan pembelajaran politik kepada pemilih pemula dan mengajak mereka untuk memberikan suara pada Pilkada serentak 2020.

Selain sosialisasi melalui daring, KPU Kota Tanjungpinang juga beberapa kali melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan masyarakat tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam mengsucceskan pilkada serentak 2020 di Kota Tanjungpinang, KPU Kota

Tanjungpinang juga bekerja sama dan di bantu oleh stakeholder-stakeholder yang ada di lingkungan Pemkot Tanjungpinang seperti Bawaslu, Kesbangpol dan juga dari Partai politik sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan tujuan besar mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak 9 Desember 2020. Seperti yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Tanjungpinang dalam rangka mensukseskan pilkada serentak 2020 mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Kota Tanjungpinang dengan bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Kota Tanjungpinang.

Berbicara mengenai sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih tentu partai politik mempunyai peran penting, karena pada dasarnya KPU Kota Tanjungpinang sebagai penyelenggara dan yang mempunyai massa dan pendukung itu adalah calonpeserta pilkada maupun partai politik itu sendiri.

3. Alokasi Sumber Daya

Sumber daya berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga dengan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk dapat mencapai visi, misi serta tujuan yang sudah ditetapkan. (Gleko et al., 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dan notulensi peneliti dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, petugas KPPS, dan relawan demokrasi, dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya dalam melakukan sosialisasi, KPU Kota Tanjungpinang melakukan bimbingan teknis kepada relawan demokrasi dengan tujuan agar mereka memahami bagaimana tupoksi dari masing-masing segmen dan memberikan gambaran kepada relawan demokrasi tentang bagaimana kondisi dilapangan.

Sementara bagi petugas KPPS selain diberikan bimbingan teknis KPU Kota Tanjungpinang juga melakukan uji coba disalah satu TPS yang juga melibatkan petugas TPS, dan masyarakat yang mencoblok di TPS tersebut nantinya, uji coba ini dilakukan guna untuk memberi pengetahuan dan gambaran kepada petugas KPPS dan masyarakat tentang bagaimana melakukan pencoblosan pada masa pandemi covid-19. Adapun untuk semua kegiatan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dimasa pandemi covid-19 semua dana seperti yang disampaikan oleh bapak Aswin nasution S.Pt menjelaskan sumber anggarannya berasal dari APBD propinsi melalui KPU propinsi Kepulauan Riau.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan partisipasi politik pada masa pandemi covid-19 yang dianalisa menggunakan teori dari chandler tentang tahapan penyusunan strategi dapat disimpulkan bahwa terwujudnya pilkada yang demokratis tidak lepas dari penyelenggara pilkada itu sendiri yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, dalam tahapan Formulasi dan Sasaran Jangka panjang untuk mensosialisasikan pilkada serentak 2020 sesuai dengan yang jelaskan chandler dalam tahapan penyusunan strategi, dapat dilihat dari sudah jelasnya target,tujuan, dan strategi yang dipilih oleh KPU Kota Tanjungpinang.

Jika dilihat dari pemilihan tindakan yang diambil oleh KPU Kota Tanjungpinang berdasarkan yang telah dirumuskan telah dilaksanakan namun belum mendapatkan hasil yang maksimal karena sosialisasi melalui daring dan media terdapat keterbatasan interaksi antara KPU dengan masyarakat. Sedangkan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah memberikan Bimtek atau bimbingan teknis kepada seluruh penyelenggara pilkada baik itu dari relawan demokrasi maupun petugas KPPS dengan tujuan memberi pemahaman dan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi mereka kepada penyelenggara pilkada.

Tidak dapat dipungkiri Covid-19 menjadi kendala yang besar bagi petugas KPU dalam melakukan sosialisasi dan diharapkan pada pemilu selanjutnya dapat ditemukan solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai kendala dilapangan.

V. Daftar Pustaka

- Araaf, B. A. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau dalam Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa di Kota Pekanbaru pada pemilihan Gubernur Riau 2018. *JOM FISIP*, 6.
- Budio, S. (2019). Strategi Manajemen Sekolah. *Jurnal Menata*, 2(2), 64.
- Eva Fauzia. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, 5(9), 191–200.
- Fitriah, Alfidaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10>
- Gleko, P., Suprojo, A., & Widi Lestari, A. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 38–47.
- Haryono, D. (2018). Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015. *EJournal Administrative Reform*, 4(2), 67–73.
- Kario, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan FISPOL UNSRAT, 2015(Lmd)*, 1–20.
- Lailiyah, N., & Abdulrahman, W. (2017). Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial bagi Pelaksanaan Fungsi Anggota DPRD Jawa Tengah. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 8(23), 63.
- Muhammad, A. S., Sucipta, P. R., Gusrizal, & Wahyudi, R. (2018). *Orientasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum (Studi Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kota Tanjungpinang)*. K-Media.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & ... (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/2439>
- Siti Zaenab, N. H. (2019). strategi komunikasi komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1).
- Subakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Subiyakto, R. (2011). Panggung Politik Kiai Di Era Pemilukada. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 45(22), 115–130. <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/28>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABTA.
- Sukma, N., & Putri, nora eka. (2019). Strategi Komunikasi KPU Kota Padang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada PemiluKada Tahun 2018. *Journal Ranah Research*, 191–198.

Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 atas tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau nomor 217/PL.02.6-kpt/21/Pro/XII/2020 Tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020.

VI. Ucapan Terimakasih

Terima Kasih kepada KPU Kota Tanjungpinang, Bawaslu Kota Tanjungpinang, dan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, DPC Golkar Kota Tanjungpinang dan DPC PDI Kota Tanjungpinang serta relawan demokrasi dan masyarakat Kota Tanjungpinang yang telah membantu peneliti dalam menyusun data untuk menyusun penelitian ini serta kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyusun penelitian Ini.